



### **Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak Masih Menjadi Persoalan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**

**Semarang, Jumat (05/05/23)** – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 kepada Empat Pemerintah Kabupaten Daerah (Pemda). Keempat pemda tersebut adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen, Pemkab Klaten, Pemkab Blora, dan Pemkab Wonogiri. Atas LKPD Keempat Pemda tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Digelar di auditorium lantai 3 gedung BPK Jateng, acara penyerahan LHP dihadiri oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD masing-masing kabupaten. Turut hadir pula dalam acara tersebut, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Jateng dan Kepala Subauditorat Jateng II. Para sekretaris daerah dan kepala OPD dari masing-masing kabupaten juga ikut menghadiri acara penyerahan LHP tersebut.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Jateng Hari Wiwoho menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK telah melakukan beberapa pengujian, yaitu pengujian analitis, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo. “Pengujian dilakukan untuk menilai kewajaran penyajian saldo, kepatuhan terhadap perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, dan efektifitas implementasi sistem pengendalian intern,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hari Wiwoho menyampaikan bahwa meskipun keempat Pemda berhasil mempertahankan opini WTP, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian oleh Pemda, antara lain Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran; Kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi intensif dewan, honorarium narasumber dan belanja perjalanan dinas; Pengelolaan Dana BOS SMP yang kurang memadai; serta Pengawasan dan pengendalian atas Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Pemerintah Desa belum memadai.

Kalan BPK Jateng Hari Wiwoho menegaskan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK. Hari juga berharap agar pimpinan DPRD dapat memanfaatkan informasi dalam LHP untuk mendorong Pemkab lebih meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD secara transparan dan akuntabel.

---

#### **Informasi lebih lanjut:**

Siti Rahmawati Arifah, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat  
Telp. 024-8660826 Ext. 2013  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)